

# BAB I PENDAHULUAN



## A. Latar Belakang

Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen Rencana Kerja yang disusun oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasikan Rencana strategis (Renstra). Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja di Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan dokumen Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun sebelumnya.

Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau provinsi dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Badan Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21 );

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021j (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 815);

22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Laporan Evaluasi terhadap hasil renja tahun 2022 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya.

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022.
3. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022.

### **D. Metode Evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

Pada bagian ini memuat tentang metode evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

#### **a. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini adalah dengan

menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang.

#### **b. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

**Tabel 1. Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan**

<b>No.</b>	<b>Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1</b>	<b>Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2</b>	<b>Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3</b>	<b>Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4</b>	<b>Status</b>
1	22,5 % ≤ 100	45 % ≤ 100	68 % ≤ 100%	91% ≤	Sangat tinggi
2	20 % ≤ 22,5	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

##### **1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

## **2. Hasil Sedang**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

## **3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

### **c. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam pencapaian target Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bab ini berisi tentang uraian tujuan, sasaran dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi. Penyajian tujuan, sasaran dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2022
1.	Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan Negara di Provinsi Kepulauan Riau Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Peningkatan Kapasitas Implementasi dan Tata Kelola Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	<b>Persen</b>	35%	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang terealisasi	35%



### BAB III

## PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN SUB KEGIATAN DPA DAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bab ini berisi tentang uraian perbandingan antara jumlah program, sub kegiatan dan anggaran DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.1 Perbandingan DPA, Renja dan Renstra Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
<b>5.06.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	√	√	√
<b>5.06.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau</b>	√	√	X
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	X
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	√	√	X
<b>5.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau</b>	√	√	√
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	√
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√	√	√
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√	√	√
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	√
	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√
<b>5.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	√	√	√
	Pengadaan Mebel	√	√	√
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	√	√	√

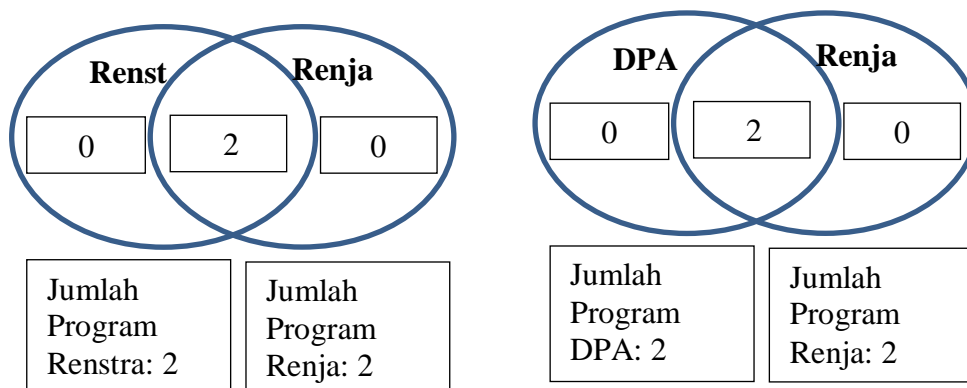
<b>5.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	√	√	√
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√
<b>5.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	√	√	√
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√
<b>5.06.02</b>	<b>Program Pengelolaan Perbatasan</b>	√	√	√
<b>5.06.02.1.01</b>	<b>Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama</b>	√	√	√
	Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	√	√	√
	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	√	√	√
<b>5.06.02.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	√	√	√
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	√	√	√
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	√	√	√
	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah	√	√	√
	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	√	√	√
<b>5.06.02.1.03</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	√	√	√

	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	√	√	√
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	√	√	√
	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√

**A. Perbandingan Jumlah Program Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

Perbandingan antara jumlah Program dalam DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada tahun 2022 dapat dilihat pada *flowchart* 1 berikut;

**Flowchart 1: Perbandingan jumlah Program DPA, Renja dan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2022**



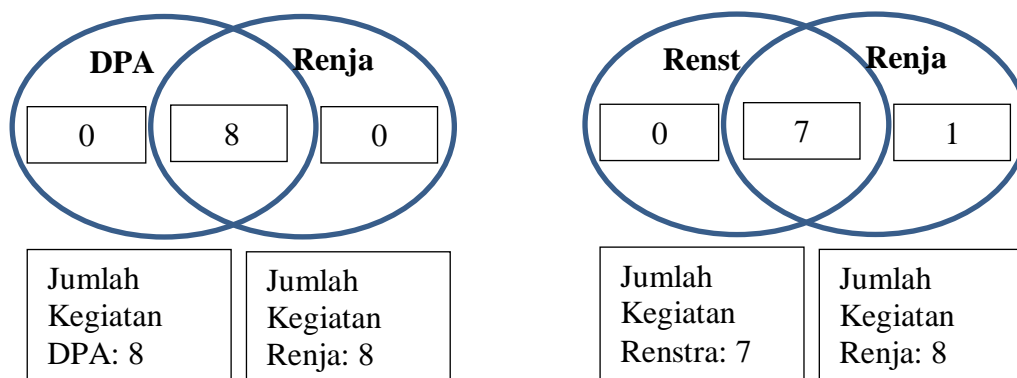
Uraian penjelasan;

Jumlah Program yang dilaksanakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sangat konsisten dimana jumlah program dalam Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sangat konsisten yaitu terdiri dari 2 (dua) Program yang sama baik nama program maupun jumlah programnya. Merupakan implemmentasi dari nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 beserta pemutakhirannya.

## B. Perbandingan Jumlah Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Perbandingan antara jumlah Kegiatan dalam DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dapat dilihat pada *flowchart* 2 berikut;

**Flowchart 2: Perbandingan jumlah Kegiatan DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2022**



Uraian penjelasan:

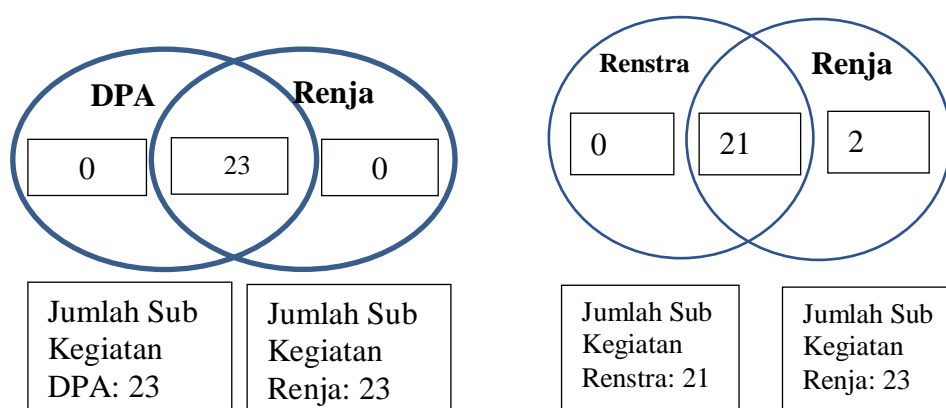
Dari *flowchart* di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2022 terdapat 8 (delapan) kegiatan yang seluruhnya ada dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2022 yang total kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2022 terdapat 8 (delapan) kegiatan.

Dokumen Rencana Kerja dan dokumen Rencana Strategis OPD Irisan kegiatan dalam Renstra terdapat 7 (tujuh), tetapi didalam renja ada 8 (delapan) dikarenakan ada kegiatan yang perlu dilaksanakan namun tidak tercantum dalam Renstra.

### C. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Perbandingan antara jumlah Sub Kegiatan dalam DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada tahun 2022 dapat dilihat pada *flowchart* 3 berikut;

**Flowchart 3: Perbandingan jumlah Sub Kegiatan DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2022**



Uraian penjelasan:

Dari *flowchart* di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2022 terdapat 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang seluruhnya ada dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2022 yang total kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah terdapat 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.

Dokumen Rencana Kerja dan dokumen Rencana Strategis OPD Irisan kegiatan dalam Renstra terdapat 21 (dua puluh satu), tetapi didalam renja ada 23 (dua puluh tiga) dikarenakan ada kegiatan yang belum tercantum dalam Renstra dan perlu dilaksanakan.

## BAB IV

### CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA

Bab ini berisi tentang data informasi dan uraian analisis capaian kinerja sasaran, program dan sub kegiatan renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

#### A. Capaian Target Indikator Sasaran

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sasaran Renja yang dievaluasi.

**Tabel 5.1**  
**Pencapaian Target Indikator Sasaran Triwulan IV**  
**(Januari – Desember 2022)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)
	Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan Negara di Provinsi Kepulauan Riau Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Peningkatan Kapasitas Implementasi dan Tata Kelola Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	%	35	49,47	141,34	Sangat tinggi

**Triwulan IV Tahun 2022** (data masuk sampai bulan Desember 2022) realisasi Indikator kinerja Sasaran yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** dengan presentase 141,34%. Capaian persentase kinerja sudah mencapai target sesuai dengan program yang telah direncanakan. Dimana dalam rencana aksi jumlah rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan direncanakan sebanyak 283 kegiatan tahun 2022, yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan Se-Provinsi Kepulauan Riau. Dengan

Realisasi sebanyak 140 Program Kegiatan. Namun dalam Pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya kondisi geografis yang menyebabkan lokasi kegiatan tidak dapat dimonitoring secara maksimal, biaya yang cukup tinggi dan ketersediaan transportasi reguler yang sangat terbatas antar pulau.

## B. Capaian Target Indikator Program

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator Program Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja Program Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

**Tabel 5.2**  
**Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Hingga Triwulan IV**  
**(Januari – Desember 2022)**

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Target 2022	Kategori Kinerja (Status)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE TINGKAT KELANCARAN PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR	%	100	100	97,08	ST
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	PERSENTASE OUTCOME PROGRAM PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI	%	35	49,47	141,34	ST

**Pada Triwulan IV Tahun 2022** (data masuk sampai bulan Desember 2022) realisasi capaian kinerja program dalam kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata sebesar **119,21%**, capaian kinerja yang diperoleh maksimal dan mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.



Sementara informasi dan analisis capaian realisasi anggaran program Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi dapat dilihat dari tabel 5.3 berikut;

**Tabel 5.3. Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan IV (Januari – Desember 2022)**

No	Nama Progam	Realisasi Anggaran	Status
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	97,08	ST
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	91,57	ST

**Pada Triwulan IV Tahun 2022** (data masuk sampai bulan Desember 2022) realisasi anggaran pada program yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** yaitu; pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisasi sebesar 97,08% atau Rp. 6.401.319.978 dan Program Pengelola Perbatasan yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** dengan realisasi sebesar 91,57% atau Rp. 528.570.158

Semua Program yang telah direncanakan terealisasi dengan baik dan mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

### C. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut;

**Tabel 5.4**  
**Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan Triwulan IV**  
**(Januari – Desember 2022)**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
I	<b>Program Pengelolaan Perbatasan</b>	<b>577.256.289</b>	<b>528.570.158</b>					
1	<b>Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama</b>	<b>194.516.489</b>	<b>170.632.292</b>					
1.1	Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	60.786.789	53.919.313	100	88,70	ST	ST	
1.2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	169.999.700	116.712.979	100	87,28	ST	ST	
2	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>210.310.600</b>	<b>193.238.493</b>	-	-			
2.1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	138.310.600	126.704.018	100	91,61	ST	ST	
2.2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	24.000.000	21.826.133	100	90,94	ST	ST	
2.3	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	24.000.000	22.538.210	100	93,91	ST	ST	
2.4	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya,	24.000.000	22.170.132	100	92,38	ST	ST	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
	Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan							
3	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	172.429.200	164.699.373	100	-			
3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	112.500.200	110.455.242	100	98,18	ST	ST	
3.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	22.028.500	19.184.151	100	87,09	ST	ST	
3.3	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.900.500	35.059.980	100	92,51	ST	ST	
<b>II</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>6.593.639.031</b>	<b>6.401.319.978</b>	<b>100</b>	<b>97,08</b>			
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>5.186.827.344</b>	<b>5.031.102.687</b>					
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.952.236.844	4.801.784.687	100	96,96	ST	ST	
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.590.500	229.318.000	100	97,75	ST	ST	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>625.818.897</b>	<b>619.949.321</b>					
2.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.047.000	23.924.500	100	99,57	ST	ST	
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.549.100	44.608.775	100	93,82	ST	ST	
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.917.200	49.762.000	100	99,69	ST	ST	
2.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	19.500.000	19.360.000	100	99,28	ST	ST	
2.5	Fasilitasi Kunjungan Tamud	24.007.567	23.354.000	100	97,28	ST	ST	
2.6	Penyelenggaraa n Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.817.530	458.940.046	100	99,59	ST	ST	
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>512.342.790</b>	<b>481.703.470</b>					
3.1	Pengadaan Mebel	67.986.200	66.895.500	91,67	98,4	ST	ST	
3.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	444.356.590	414.807.970	95,45	93,35	ST	ST	
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>220.650.000</b>	<b>220.564.500</b>					
4.1	Penyediaan Jasa Surat	4.000.000	4.000.000	100	100	ST	ST	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
	Menyurat							
4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000	35.997.000	100	99,99	ST	ST	
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.650.000	180.567.500	100	99,95	ST	ST	
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>					
5.1	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.000.000	48.000.000	100	100	ST	ST	
	<b>Total</b>	<b>7.170.895.320</b>	<b>6.929.890.136</b>	<b>101,08</b>	<b>96,64%</b>	ST	ST	

Dari tabel pencapaian target anggaran dapat disimpulkan bahwa;

1. Realisasi anggaran Badan Pengelola Perbatasan Dearah Provinsi Kepulauan Riau TW IV (Januari – Desember 2022) sebesar Rp. **6,929,890,136** atau **96,64%**.
2. Status pencapaian realisasi Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Dearah Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan IV ( Januari – Desember 2022) dengan realisasi target indikator sub kegiatan yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)**.
3. Adapun Realisasi anggaran Badan Pengelola Perbatasan Dearah Provinsi Kepulauan Riau kegiatan hingga Triwulan IV Tahun 2022 berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)**.

## **BAB V**

### **KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Data laporan pembangunan Kawasan Perbatasan yang diperoleh tidak optimal.
2. Kondisi geografis Kawasan Perbatasan Kepulauan Riau yang sulit dijangkau, (Anggaran cukup tinggi dan perubahan iklim cuaca).
3. Terdapat rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak maksimal.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2022 telah berusaha menunjukkan kinerja yang maksimal melalui pelaksanaan serangkaian program-program yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang diembannya untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Pada tahun 2022 ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 (dua) Program yang terbagi dalam 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.

Secara umum realisasi fisik dan keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang didanai dari APBD pada Triwulan IV tahun 2022 mengalami kenaikan dari Triwulan sebelumnya, di mana perbandingan realisasi kinerja dan keuangan hingga akhir September 2022 rata-rata realisasi kinerja 101,14% (Sangat Tinggi) dan realisasi keuangan mencapai 6.929.890.136 atau 96,64% (Sangat Tinggi) dari pagu APBD yang dikelola sebesar 7.170.895.320.

Dari capaian realisasi tersebut, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **B. Rekomendasi**

Adapun beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

- 1) Perlunya koordinasi dan konsolidasi antara Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pimpinan agar melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.

- 3) Pemenuhan Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Demikianlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2022 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta menjadi bahan evaluasi dan pengendalian pada triwulan berikutnya. Dengan dibuatnya laporan evaluasi hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah ini diharapkan akan lebih memudahkan bagi pimpinan dan staf dalam mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan ke depannya.